RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2024

BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

KATA PNGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Penyusunan Perubahan Renja ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peaturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026.

Rencana Kerja 2024 sebagai penjabaran Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023–2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2024 Satpol Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Pangkalpinang, 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

YAMOWA'A HAREFA, AP. NIP.
19750130 199402 1 003

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	11
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
	2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	45
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	45
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	46
	3.3 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	48
	3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	51
	3.5 Program dan Kegiatan Tahun 2022	52
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	54
BAB V	PENUTUP	86

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	13
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	24
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	29
Tabel 3.1	Sasaran dan Target Kinerja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dan Tahun 2024	47
Tabel 3.2	Analisis Renstra K/L Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan	49
Tabel 3.3	Target Sasaran Strategis SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 202**3**	52
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	59

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Renja PD sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dimana RKPD dijadikan dasar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sedangkan Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja kabupaten/kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD dilihat dalam gambar di bawah ini :

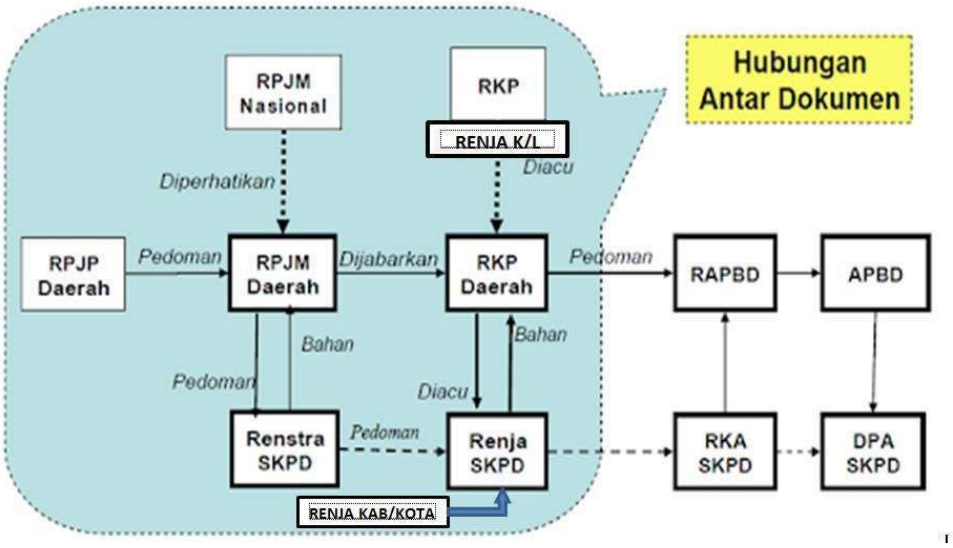

Gambar I.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat daerah disusun dengan tahapan: (1). persiapan penyusunan; (2). penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum /lintas bidang; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan.

Penyusunan Renja Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (SATPOL PP) Tahun 2023 memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran tahun kelima dari Renstra Tahun 2017-2022 sehingga prioritas sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan

diarahkan pada pencapaian target akhir Renstra. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu dan saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan tahapan penyusunan renja diatas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Perangkat Daerah berkewajiban menyusun rancangan renja untuk tahun 2023. Renja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 menjadi bahan penelaahan penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan akan dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 131);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 –2034);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah sebagai dasar penyusunan rancangan KUA PPAS SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan optimalisasi pencapaian sasaran Renstra SATPOL PP.

Tujuan penyusunan Renja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah:

1. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi

pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SATPOL PP agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SATPOL PP Tahun 2022 dan Capaian Renstra SATPOL PP

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun anggaran 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SATPOL PP

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SATPOL PP berdasarkan indikator kinerja yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi SATPOL PP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SATPOL PP

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SATPOL PP dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SATPOL PP; menguraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SATPOL PP Provinsi dengan SATPOL PP kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SATPOL PP;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bapepda.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SATPOL PP.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SATPOL PP

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SATPOL PP yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SATPOL PP.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 dan pencapaian kinerja Renstra SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SATPOL PP dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SATPOL PP serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat. Dengan memperhatikan pembangunan bidang pada RKP tahun 2023 dan program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perubahan RKPD tahun 2022 maka Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 mencakup 4 program dan 17 kegiatan.

Untuk target kinerja kegiatan menyesuaikan hasil refocussing kegiatan dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2022. Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan dari tiap program yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Renja Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022, dapat diketahui bahwa SATPOL PP Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung untuk realisasi kinerja sampai dengan triwulan ke IV sebesar 77 % dengan predikat Sangat Tinggi (ST) sedangkan untuk rata-rata capaian keuangan seluruh program sebesar 92 % dengan predikat Tinggi (T).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d dengan Tahun 2021(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (n-2)			Target program (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)(2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
	-									
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sakip PD/SATPOL PP (Presentase)	80	80	80%	80	100%	80	100%	1,25%
		Survey kepuasan pelayanan keuangan (Persentase)	95	95,04	95%	95,04	99,95%	95	99,95%	1,05%
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran tribuntrnmas yang ditindak	100 %	100	100	100 %	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d dengan Tahun 2021(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (n-2)			Target program (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)(2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
		Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	39,3%	100	100	100 %	100%	35,7%	100%	2,8%
		Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	31,14%	20,98	55,07 %	20,98	38,09%	26,34%	48,21	34,13%
		Persentase personil SATPOL PP yang berkompeten	81,1	52,00	93,33	52,00	55,71%	78,4	85,33	60,8%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase aparatur pemadam kebakaran sesuai klasifikasi	67%	28,75%	28,92%	28,75%	28,83%	64%	42,53%	60,67%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d dengan Tahun 2021(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (n-2)			Target program (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)(2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)
		cakupan relawan pemadam kebakaran dikabupaten dan kota	0	6,3	0,39	6,3	1615	0	6,3	6,3
		Persentase aparatur pemadam kebakaran sesuai kualifikasi	0	24	70,19	24	34,19	0	24	24
		Persentase sapras pemadam kebakaran dan pertolongan dalam kondisi baik	0	85	85	85	100	0	85	85
		Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	67	0				64		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d dengan Tahun 2021(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (n-2)			Target program (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)(2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)

Berdasarkan hasil Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 (Tabel II.1) diatas, dapat disajikan bahwa terdapat evaluasi berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dan 2023 - 2026 untuk sandingan evaluasi Renja Tahun 2022 dan sandingan evaluasi Renja perkiraan Tahun 2023.

Adapun kendala yang dihadapi terkait terhambatnya pencapaian target kinerja dan keuangan SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Adanya pandemi *Covid* 19 selama tahun berjalan sehingga menyebabkan beberapa kegiatan direalokasi dan fokus terhadap penanganan *Covid* 19 serta untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disusun jadwal dan yang telah dialokasikan anggarannya
2. Kurangnya Penguasaan Inovasi Aplikasi SIPD yang masih perlu dilakukan Bimbingan Teknis bagi penggunanya
3. Lamanya ditetapkan Perubahan APBD sehingga beberapa pelaksanaan kegiatan masih menunggu penetapan tersebut.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Akhir Tahun Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. tahun berjalan (2021)	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian sd tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8=7/6)*	*(9)*	*(10=5+7+9)*	*(11=(10/4)*
1.05.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Survei kepuasan pelayanan internal	95%	-	-	-	-	90%	90%	100%
		Nilai SAKIP perangkat daerah	80	79,17	77	79,34	1,030	80	238,51%	159.51%
1.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	21 dokumen	5%
1.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Survei kepuasan pelayanan keuangan	95%	93%	80%	80%	100%	95%	268%	2,82%
1.06	Administrasi umum perangkat daerah	Survei kepuasan pelayanan	90%	89%	90%	69,94%	77,71%	90%	256,71%	3%

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Akhir Tahun Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. tahun berjalan (2021)	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian sd tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8=7/6)*	*(9)*	*(10=5+7+9)*	*(11=(10/4)*
		umum								
1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah urusan penunjang pemda yang disediakan	14 jenis	6 jenis	6 jenis	5 jenis	83,33%	7 jenis	jenis	1,2%
1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemrintahan daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah	127 unit	50 unit	56 unit	47 unit	84%	70 unit	5 unit	1.4%
1.05.02	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran tibumtranmas yang ditindak	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Persentase penegakan pelanggaran perda	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
		Persentase satlinmas yang	44,78%	-	-	-	-	44,78%	44,78%	100%

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Akhir Tahun Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. tahun berjalan (2021)	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian sd tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8=7/6)*	*(9)*	*(10=5+7+9)*	*(11=(10/4)*
		terlatih dalam penyelenggaraan kantrantibmas dan membantu penanganan bencana dan kebakaran								
		Persentase personil satpol pp yang berkompeten	83,75%	-	-	-	-	83,75%	83,75%	100%
1.01	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3096 kali	650	851	689	80,96%	1 (dokumen)1548 kali	2887 kali	93,24%
1.02	Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Jumlah aktivitas penegakan perda dan perkada	104 kali	-	50 kali	72kali	1,5%	52 kali	52 kali	50%

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Akhir Tahun Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. tahun berjalan (2021)	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian sd tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8=7/6)*	*(9)*	*(10=5+7+9)*	*(11=(10/4)*
1.05.04	penanganan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	aparatur pemadam kebakaran sesuai kualifikasi	70,19%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase sapras pemadam kebakaran dan pertolongan dalam kondisi baik	85%	-	-	-	-	-	-	-
1.01	Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Jumlah dokumen peta daerah rawan kebakaran	1 dokumen	-	-	-	-		-	-
		Jumlah sapras pemadam kebakaran dan pertolongan yang	26 jenis	-	-	-	-	4 jenis	4 Jenis	5,26%

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Akhir Tahun Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. tahun berjalan (2021)	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian sd tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8=7/6)*	*(9)*	*(10=5+7+9)*	*(11=(10/4)*
		sesuai standar								
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang mampu menanggulangi kebakaran	80 orang	-	10 orang	10 orang	100%	-	-	-
		Jumlah dokumen standarisasi sapras pemadam kebakaran dan pertolongan	10 Dokumen	-	-	-	-	-	2	33,33%
		umlah dokumen kerjasama antar daerah/antar lembaga	1 kali	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022 maka SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada dasarnya kegiatan SATPOL PP adalah sebagai "Pengarah". Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi PD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke *working plan*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar- benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP
Provinsi kepulauan Bangka Belitung

No.	Indikator	Target Renstra PD (kuambil dari terget renstra)						Realisasi Capaian (lakip)				Proyeksi (2023, kira2)	Catatan
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	
1.	Persentase penurunan gangguan ketertibann umum dan ketentraman masyarakat	-	95%	90%	85%	26,00%	25,30%	65%	63%	26,26	48,47%	50%	-
2.	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/ pertolongan	-	10,23%	16,33%	22,38%	30%	35 %	7,87%	8%	-	61,60%	63,80%	-
3	Nilai RB unit Satpol PP	-	-	--	-	12	13	-	-	-	12,22	13%	

2.2.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam pelayanan tugas dan fungsi SKPD adalah:

1. Masyarakat Provinsi kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya merasakan tentram, tertib, teratur dan aman serta terlindungi dalam menjalankan kegiatannya. Terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui sepanjang tahun 2017 sebanyak 3.584 orang/pelanggar, tahun 2018 sebanyak 2.353 orang/pelanggar , Tahun 2019 sebanyak 975 orang/pelanggar; Tahun 2020 sejumlah 941, Tahun 2021, sejumlah 1737, serta Tahun 2022 sejumlah 1485. Kasus Terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengalami peningkatan karena dampak dari COVID_19 yang menyebabkan besarnya masyarakat kehilangan pekerjaan sehingga menyebabkan banyak pelanggaran terjadi

2. Kondisi kenyamanan, ketentraman, ketertiban dan keamanan juga dapat digambarkan dengan angka jumlah kriminalitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun *trend*nya menurun, terjadi tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kasus tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2017 sebanyak 1.490 kasus. Tahun 2018 sebanyak 1.447 kasus, tahun 2019 sebanyak 1.453 kasus, Tahun 2020 sejumlah 1320, Tahun 2021, sejumlah 1444, Tahun 2022 sejumlah 1485. Sama halnya meningkatnya kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga mengakibatkan Meningkatnya jumlah tindak kriminal ini menggambarkan dampak dari COVID_19 yang menyebabkan besarnya masyarakat kehilangan pekerjaan sehingga menyebabkan kurang amannya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Belum semua Bangka Belitung mendapatkan pelatihan dalam rangka , serta membantu penanganan bencana dan kebakaran. Data per 31 Desember 2021 jumlah anggota Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 3845 orang, namun baru 1407 orang anggota Satlinmas yang telah mendapatkan pelatihan;
4. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang sering mengalami bencana kebakaran, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang yang sering mengalami bencana kebakaran. Sampai dengan tahun 2019 telah terjadi 1.565 kasus kebakaran, Tahun 2020 terjadi 403 kasus kebakaran,Tahun 2021 terjadi sebanyak 227 kasus pada Tahun 2022 terjadi sebanyak 225 sehingga sampai Saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peta khusus daerah rawan kebakaran. Tidak hanya itu, kecuali anggota Satlinmas, masyarakat/relawan pemadam kebakaran belum diberikan pemahaman metode pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan.

2.2.2 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2022 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya Bimbingan teknis Linmas dalam menangani kantarntibmas, bencana dan kebakaran karena sosial distancing/ Jaga jarak yang diterapkan oleh pemerintah
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah yang telah dikembangkan.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di

atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan bimbingan teknis Linmas secara *zoom meeting*, guna mengoptimalkan kapasitas linmas dalam menangani bencana dan kebakaran

2. Melakukan koordinasi ke bidang – bidang internal SATPOLPP untuk meningkatkan efektfitas dan efisiensi pada program, kegiatan dan sub kegiatan

3. Mengajukan sosialisasi atau bimbingan teknis ke Badan Keuangan Daerah atau mengajukan studi banding guna studi referensi terkait sistem informasi pembangunan daerah

2.2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL PP

Berdasarkan tugas dan fungsinya serta hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Renstra Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 dan Renstra SATPOL PP kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, serta hasil analisis terhadap KLHS, SATPOL PP dihadapkan pada beberapa tantangan dalam memberikan pelayanan pada masa-masa yang akan datang. Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh SATPOL PP antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap peraturan perundang-undangan daerah
2. Tuntutan terhadap pelayanan Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan perda/perkada
3. Luasnya cakupan wilayah/ wilayah kepulauan

Kebebasan berpendapat, yang menjamin masyarakat untuk menyuarakan pendapat melalui demontrasi/unjuk

rasaSedangkan peluang bagi SATPOL PP dalam melaksanakan pelayanan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan masyarakat akan kondisi hidup yang tertib, tentram, aman dan terlindungi dari bencana
2. Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan peran dan tugas Satpol PP
3. Peraturan yang mengamanatkan Satpol PP dapat bekerjasama dan penegak hukum seperti Kepolisian dan TNI

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dilakukan dengan melakukan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan BAPPEDA

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pkp	Nilai Sakip PD	80%	340.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Sakip PD	80%	340.000.000
			Indeks Kepuasan pelayanan internal	77%	15.124.569.520			Indeks Kepuasan pelayanan internal	77%	15.124.569.520
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pkp	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	340.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	340.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pkp	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	210.000.000	Penyusunan Dokumen Perencana an Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	210.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pkp	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	25	90.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	25	90.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pkp	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	100.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pkp	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan	81%	11.701.500.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pkp	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan	81%	11.701.500.000
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pkp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjanga	78	11.670.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pkp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjanga	78	11.670.000.000
	Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pkp	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	60	6.500.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Pkp	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	60	6.500.000
	Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Pkp	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	5.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Pkp	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	5.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Pkp	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13	20.000.000	Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Pkp	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13	20.000.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik	Pkp	Jumlah BMD yang Teradmini	1134/2	3.500.000	Administrasi Barang Milik	Pkp	Jumlah BMD yang Teradmini	1149/2	3.500.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Daerah pada Perangkat Daerah		trasi Sesuai dengan Peraturan			Daerah pada Perangkat Daerah		trasi Sesuai dengan Peraturan		
	Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pkp	Jumlah Rencana Kebutuh a n Barang Milik Daerah SKPD	2	3.750.000	Penyusuna n Perencana a n Kebutuha n Barang Milik Daerah SKPD	Pkp	Jumlah Rencana Kebutuh a n Barang Milik Daerah SKPD	2	3.500.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pkp	Indeks kepuasan pelayanan kepegawai an	81		Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah		Indeks kepuasan pelayanan kepegawai an	80	360.000.000
	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawa i	Pkp	Jumlah Unit Peningkat an Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	10.000.000					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya	Pkp	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengka p an	78	97.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	Pkp	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengka p an	227	371.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pkp	Jumlah Pegawai Berdasark an Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	10	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasark an Tugas dan Fungsi	Pkp	Jumlah Pegawai Berdasark an Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	10	160.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pkp	Indeks kepuasan pelayanan administr asi umum perangkat daerah	95%	393.300.000	Administra si Umum Perangkat Daerah	Pkp	Indeks Kepuasan Pelayanan Adminitra si Umum Perangkat Daerah yang disediaka n	95%	325.760.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener a ngan Bangunan Kantor	Pkp	Jumlah Paket Kompone n Instalas Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediaka n	1	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pe n erangan Bangunan Kantor	Pkp	Jumlah Paket Kompone n Instalas Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediaka n	1	10.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pkp	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n	1	3.000.000					
	Fasilitasi Kunjunga n Tamu	Pkp	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga n Tamu	10	14.000.000	Fasilitasi Kunjunga n Tamu	Pkp	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga n Tamu	10	12.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pkp	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n	2	19.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pkp	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n	1	19..500.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	Pkp	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n	1	17.800.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Pkp	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n	1	17.700.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pkp	umlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediaka n	1	18.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Pkp	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediaka n	1	16.560.000
	Penyediaan Bahan/Materi a l	Pkp	Jumlah Paket Bahan/M aterial	4	81.000.000	Penyediaan Bahan/Mat erial	Pkp	Jumlah Paket Bahan/M aterial	4	80.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
			yang Disediakan					yang Disediakan		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pkp	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	14.000.000					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pkp	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	225.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pkp	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	170.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	29	1.205.569.520	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	29	1.185.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pkp	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pkp	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	75.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pkp	Jumlah barang milik daerah penunjang pemerintah daerah yang diadakan	1	375.569.520	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pkp	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakaan	4	1.060.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pkp	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	680.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pkp	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	50.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Pkp	Jumlah Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	7	646.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta h an Daerah	Pkp	Jumlah Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	7	576.100.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pkp	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	12	3.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pkp	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	12	3.700.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pkp	Jumlah laporan penyediaa n jasa penunjan g urusan PD	36	180.000.000	Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	Pkp	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	36	120.000.000
	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Pkp	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa peralatan dan Perlengkap an kantor	12	10.000.000					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pkp	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	12	452.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pkp	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	12	452.400.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang rusan Pemerintaha n Daerah	Pkp	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjan g Uruan Pemerinta h Daerah yang diadakan	29	627.000.000	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang rusan Pemerinta h an Daerah	Pkp	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjan g Uruan Pemerinta h Daerah yang diadakan	29	1.185.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pkp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pkp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	261.073.000
	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Pkp	Laporan Pemeliharaan Mebel	1	2.000.000					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pkp	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pkp	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	30.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Pkp	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	1	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Pkp	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan Dipelihara/Direhabilitasi	1	25.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Babel	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	9.796.500.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Babel	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	9.150.000.000
		Babel	Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	31,14%	170.000.000		Babel	Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	26,34%	170.000.000
		Babel	Persentase personil Satpol PP yang	81,1%	120.000.000		Babel	Persentase personil Satpol PP yang	78,38%	120.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
			berkompeten					berkompeten		
		Pkp	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	39,3%	230.000.000		Pkp	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	35.70%	230.000.000
	kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Babel	Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui patroli, pengamanan, penertiban dan pengawalan berjalan lancar	604	9.440.000.000	kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Babel	Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui patroli, pengamanan, penertiban dan pengawalan berjalan lancar	604	9.440.000.000
			Jumlah penyelenggaraan pembinaan, deteksi dini dan cegah dini yang digunakan dalam pencegahan gangguan tibumtranmas	12				Jumlah penyelenggaraan pembinaan, deteksi dini dan cegah dini yang digunakan dalam pencegahan gangguan tibumtranmas	12	
			Jumlah anggota satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	50				Jumlah anggota satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	1	
			Jumlah SDM Satpol PP yang berkompeten	60				Jumlah SDM Satpol PP yang berkompeten	60	

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Sub kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umummelalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan , Patroli, Pengamanan dan Pengawalan		Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	576	8.370.000.000	kegiatan Pencegahan gangguan ketentram a n dan ketertiban umummelalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan, Patroli, Pengaman a n dan Pengawalan		Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	588	8.370.000.000
	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada	Babel	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	28	65.000.000	Penindakan atas gangguan ketentram a n dan ketertiban umum berdasark a n perda dan perkad a	Babel	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	27	65.000.000
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi	Babel	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban	1	50.000.000	Koordinasi penyelenggaraan ketentram a n dan ketertiban umum tingkat provinsi	Babel	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban	1	50.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
			umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi					umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi		
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Babel	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1	120.000.000	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Babel	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1	120.000.000
	Sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia (HAM)	Pkp	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	7	170.000.000	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia (HAM)	Pkp	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	7	170.000.000
	Sub kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Pkp	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	17	605.000.000	sub kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Pkp	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	16	605.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pkp	Jumlah dokumen layanan dampak penegakan perda dan perkada yang terlayani	1	30.000.000	sub kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pkp	Jumlah dokumen layanan dampak penegakan perda dan perkada yang terlayani	1	30.000.000
	Sub Kegiatan Penyusnan SOP Ketentraman Masyarakat	Pkp	Jumlah satu dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dibuat dan dimutakhirkan	21	30.000.000	Sub Kegiatan Penyusnan SOP Ketentraman Masyarakat	Pkp	Jumlah satu dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dibuat dan dimutakhirkan	1	30.000.000
	Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Babel	Jumlah sosialisasi perda dan pergUb terhadap masyarakat, aparatur dan badan usaha	10	120.000.000	Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Babel	Jumlah sosialisasi perda dan pergUb terhadap masyarakat, aparatur dan badan usaha	1	120.000.000
			Jumlah penindakan non yustisial terhadap pelanggar perda dan pergub	62				Jumlah penindakan non yustisial terhadap pelanggar perda dan pergub		
	Sub kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan	Babel	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan	1	120.000.000	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan	Babel	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan	1	120.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	peraturan gubernur		terhadap kepatuhan pelaksanaan perda dan pergub			peraturan gubernur		terhadap kepatuhan pelaksanaan perda dan pergub		
	Sub Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pkp	Jumlah penyidikan terhadap pelanggar perda dan pergub	99	110.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pkp	Jumlah pol pp dan ASN OPD yang memiliki kualitas sebagai PPNS	0	110.000.000
	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Pkp	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1	60.000.000	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Pkp	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1	60.000.000
	Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS penegak perda, dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS	Pkp	Jumlah dokumen pemberkasan hasil penyidikan atas pelanggar perda, jumlah perkara yang dapat disidangkan di tempat dan sekretariat PPNS di Satpol PP	2	50.000.000	Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS penegak perda, dukungan pelaksanaa n sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS	Pkp	Jumlah dokumen pemberkasan hasil penyidikan atas pelanggar perda, jumlah perkara yang dapat disidangkan di tempat dan sekretariat PPNS di Satpol PP	2	50.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
			secara operasional sudah aktif					secara operasional sudah aktif		
	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prov. Kep. Babel	Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	64%	1.420.000.000	PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Prov. Kep. Babel	Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	67%	1.420.000.000
	Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Prov. Kep. Babel	Jumlah dokumen peta daerah rawan bencana kebakaran	0	100.000.000	Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Prov. Kep. Babel	Jumlah dokumen peta daerah rawan bencana kebakaran	1	100.000.000
			Jumlah sapras pemadam kebakaran atau pertolongan yang tersedia	30	160.000.000			Jumlah sapras pemadam kebakaran atau pertolongan yang tersedia	8	160.000.000
			Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang mendapatkan pembinaan	87	960.000.000			Jumlah dokumen standarisasi sapras pemadam kebakaran dan pertolongan	106	960.000.000
			Jumlah dokumen standarisasi sapras pemadam kebakaran dan pertolongan	1	150.000.000			Jumlah dokumen standarisasi sapras pemadam kebakaran dan pertolongan	4	150.000.000
			Jumlah dokumen kerjasama antar	1				Jumlah dokumen kerjasama antar		

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
			daerah/antar lembaga					daerah/antar lembaga		
	Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Prov. Kep. Babel	Jumlah dokumen informasi daerah (Kab/Kota) rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran yang sah dan legal	1	100.000.000	Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Prov. Kep. Babel	Jumlah dokumen informasi daerah (Kab/Kota) rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran yang sah dan legal	1	100.000.000
	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kab/kota	Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	960.000.000	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kab/kota	Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	960.000.000
	Penyelenggaaan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakarang diri		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	1	60.000.000	Penyelenggaaan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakarang diri		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	1	60.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulanga n kebakaran dan alat pelindung diri		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	18	100.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggula ngan kebakaran dan alat pelindung diri		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	18	100.000.000
	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulanga n kebakaran dan alat pelindung diri		Jumlah dokumen periodik penyelenggaraan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	0	0	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggula ngan kebakaran dan alat pelindung diri		Jumlah dokumen periodik penyelenggaraan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	0	0
	Bimtek terkait pencegahan, penanggulanga n, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kab/Kota		Jumlah aparatur kebakaran yang mengikuti bimbingan teknis pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi danKabupaten/Kota	60	150.000.000	Bimtek terkait pencegah an, penanggula ngan, penyelamat an kebakaran dan penyelamat an non kebakaran Provinsi dan Kab/Kota		Jumlah aparatur kebakaran yang mengikuti bimbingan teknis pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi danKabupaten/Kota	60	150.000.000

Kode	Rancangan awal					Hasil evaluasi kebutuhan				
	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)	Program kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (rp)
	Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)					Urusan penunjang pemerintah daerah (rutin)				
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulana g an, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran	7	Pembinaa n penyeleng garaan pencegah an, penanggul angan, penyelam atan kebakara n dan penyelem atan non kebakara n	7	50.000.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengawas a n Pencegaha n, Penanggula nagan, Penyelama t an Kebakaran dan Penyelema t an Non		Pembinaa n penyeleng garaan pencegah an, penanggul angan, penyelam atan kebakara n dan penyelem atan non kebakara n	7	50.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Penyelenggar a an Pencegahan, Penanggulanga n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	Jumlah Laporan Hasil Pembinaa n Penyeleng garaan Pencegah an, Penanggul angan, Penyelam atan Kebakara n dan Penyelam atan Non Kebakara n	1	50.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Penyelengg araan Pencegaha n, Penanggul a ngan, Penyelama t an Kebakaran dan Penyelama t an Non Kebakaran		Jumlah Laporan Hasil Pembinaa n Penyeleng garaan Pencegah an, Penanggul angan, Penyelam atan Kebakara n dan Penyelam atan Non Kebakara n	1	50.000.000

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2023 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005- 2025,
c. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026,
d. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023,
e. Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
f. Renstra SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 serta f. Mempertimbangkan isu-isu yang berkembang.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan serta selaras dengan RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan untuk dijadikan acuan dalam penyusunan rancangan renja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Kerangka Pembangunan RPJMN 2020-2024 tema pembangunan nasional tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan". Hal ini juga selaras dengan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 yaitu "Penguatan Perekonomian, Sdm Dan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Sumberdaya Dengan Cerdas dan Berwawasan Lingkungan".

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah:

1. Penguatan dan peningkatan perekonomian daerah
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM
3. Peningkatkan partisipasi publik dan Tatakelola Pemerintahan
4. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 13 Seri D), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Satpol PP dan subbagian kebakaran dan penyelamatan) yang menjadi kerwenangan provinsi;
b. Penyelenggaraan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP dan subbagian kebakaran dan penyelmatan) yang menjadi kewenangan provinsi;
c. Penyelenggaraan administrasi dinas;

d. Penyelenggraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dinas; dan
e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Memperhatikan sasaran pembangunan Pemerintah tahun 2023, prioritas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 serta capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2021 dan target indikator kinerja yang direncanakan pada RENSTRA SATPOL PP tahun 2017-2022, maka rencana program dan kegiatan SATPOL PP tahun 2023 mendukung seluruh sasaran dan prioritas dimaksud serta sebagai upaya pencapaian target kinerja RENSTRA SATPOL PP. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SATPOL PP maka tujuan penyusunan Rencana Kerja SATPOL PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
2. Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah (Satpol PP)

Sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan di atas sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Sasaran dan Target Kinerja SATPOL PP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023 dan Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024
1	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyaraka	Persentase penurunan gangguan trantibum	-4,5%	-5,0%

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024
2	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	-12%	-14%
3	Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah (Satpol PP)	Predikat RB Perangkat Daerah (Satpol PP)	13	16

3.3 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019-2024 yakni "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Untuk mencapai visi tersebut akan ditempuh melalui 9 (sembilan) misi yakni:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya..
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) telah menyusun Renstra K/L Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dirjen BAK 2020-2024, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) merupakan penyusun kebijakan teknis urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sekaligus pembantu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pembina Satpol PP. Analisis terhadap Renstra K/L Dirjen BAK disajkan dalam tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.2
Analisis Renstra K/L
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan

Aspek Tinjauan	Isi AspekTinjauan	Analisis
Visi	Dirjen yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif dalam mewujudkan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tata kelola kewilayahan yang efektif dan terintegrasi untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Dalam Negeri	Dirjen yang mampu menyesuaikan diri dalam setiap keadaan, mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerinathan dalam negeri, dan memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan
Misi	1. Merumuskan regulasi yang mampu meningkatkan kualitas poenyelenggaraan trantibumlinmas dan kewilayahan 2. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan trantibum, pelayanan bencana dan pelayanan kebakaran	Misi Dirjen BAK khusus nomor 2 (dua) sangat sesuai dengan tugas Satpol yakni menegakan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Aspek Tinjauan	Isi AspekTinjauan	Analisis
	dan penyelamatan yang sesuai standar 3. Memperkuat fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) menjadi katalisator yang mampu menjadi poros strategis dalam peningkatan hubungan pusat dan daerah melalui koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, menyinkronkan pengelolaan kawasan dan perkotaan, meningkatkan kerja sama daerah, mengawal penyelenggaraan layanan perizinan terintegrasi dan terpadu serta mengefektifkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah. 4. Memperkuat basis data integrasi segmen batas dan pembakuan rupabumi dengan informasi geospasial, serta kinerja kecamatan selaku perangkat daerah yang bersifat kewilayahan. 5. Mengembangkan proses bisnis trantibumlinmas	

Aspek Tinjauan	Isi AspekTinjauan	Analisis
	dan kewilayahan yang didukung SDM yang kompeten dan optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	
Tujuan	1. Terwujudnya sistem politik yang demokrasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila 2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan public yang berkualitas dan penguatan inovasi	Dari kalimat tujuan dimaksud, nampak tidak menyinggung Satpol PP secara tegas, namun demikian sesuai tujuan nomor 1 (satu) Satpol PP memiliki peran dalam mewjudkan demokrasi yangberlandaskan nilai-nilai Pancasila dengan penyelenggaraan trantibumlinmas dengan baik
Sasaran Srategis	1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas 2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Tujuan nomor 1 (satu) merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan nomor 1 dari Dirjen BAK Kementerian Dalam Negeri

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Tahun 2023 tentunya berpedoman pada dokumen Perubahan Renstra 2023-2026 ditampilkan dalam tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.3

Target Sasaran Strategis

Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
1.	Meningkatnya ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	-5,0 %
		Meningkatnya respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran/pertolongan	Persentase respon time 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	-14 %
2.	Terwujudnya reformasi birokrasi perangkat daerah, dengan sasaran meningkatkan tata kelola internal satpol PP.	Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Satpol PP	Nilai reformasi birokrasi unit Satpol PP	16

3.5 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Perumusan program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan pencapaian misi dan misi kepala daerah, yakni misi ke 5 (lima) yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi dan ke 6 (enam) yakni pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup dan misi lainnya yang diintegrasi pada level kegiatan dan

sub kegiatan. Perumusan program dan kegiatan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana dengan peraturan tersebut mengatur nama program dan kegiatan sampai dengan sub kegiatannya.

Jumlah program dalam rancangan akhir Renja 2023 Satpol PP 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan di program urusan pemerintahan daerah, dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan dengan pagu indikatif total Rp. 26.430.519.520

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 dibawah ini merupakan program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022, terdapat 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan di program urusan pemerintahan daerah, dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan dengan pagu indikatif total Rp. 26.430.519.520

Bidang Kerja melaksanakan 2 (dua) program yakni program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, kemudian program penanggulangan kebakaran, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan sedangkan sekretariat melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang terdiri 8 (delapan) kegiatan dan 32 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Adapun nomenklatur program dan kegiatan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

A. RUTIN

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini merupakan program dalam mendukung peningkatan pelayanan rutin Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
   2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
   3. Evaluasi kinerja perangkat daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
   2. Pelaksanaan penatausahaaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan bahan logistik kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6. Penyediaan bahan/material
7. Fasilitasi kunjungan tamu
8. Penyelenggraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2. Pemeliharaan Mebel
3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

B. BIDANG KERJA

1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini merupakan program dalam mendukung pelaksanaan sub urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum

A. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

1. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
2. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
3. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa HAM
4. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
5. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

6. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
7. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
8. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
9. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada

B. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
1. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur

C. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
2. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS

2) Program Pencegahan, Penanganan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini merupakan program dalam mendukung pelaksanaan sub urusan bidang kebakaran

A. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
1. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
2. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota
3. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan

dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

4. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
5. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
6. Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota

B. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Nilai sakip perangkat daerah	Nilai sakip perangkat daerah	Pkp		80	80	215.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	80	239.000.000
							Survei kepuasan pelayanan internal	Survei kepuasan pelayanan internal	Pkp		77%	77%	14.641.633.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	81%	13.575.500.000
5	1	1	1.01		Kegiatan Perencanaan, peanggarab dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	380.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	7 Dokumen	265.000.000
5	1	1	1.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah dokumen perencanaan Renstra dan Renja PD	Jumlah dokumen perencanaan Renstra dan Renja PD	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	2 Dokumen	180.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	1	1	1.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen	90.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	25 Dokumen	30.000.000
5	1	1	1.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD, Dalev Renja dan Data Sektoral, SPM, RB)	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD, Dalev Renja dan Data Sektoral, SPM, RB)	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	120.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	7 Dokumen	55.000.000
5	1	1	1.02		Kegiatan Administrasi keuangan	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Survei kepuasan pelayanan keuangan	Survei kepuasan pelayanan keuangan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	92%	92%	11.731.500.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	92%	11.915.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	1	1	1.02	01	Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	78 Orang	78 Orang	11.670.000.0000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	78 Orang	11.900.000.000
5	1	1	1.02	03	Sub kegiatan Pelaksanaan penatusahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	60 Dokumen	60 Dokumen	6.500.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	60 Dokumen	7.000.000
5	1	1	1.02	07	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	2 Dokumen	5.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	1	1	1.02	07	Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	13 Laporan	13 Laporan	50.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	13 Laporan	3.750.000
5	1	1	1.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai sakip PD (Satpol PP)				Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1119	13	3.500.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	1134	4.000.000
5	1	1	1.03	01	Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKP	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	2 Dokumen	4.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	1	1	1.05		Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah					Program Penunjang Urusan Pemerintahan			207.500.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah		510.000.000
5	1	1	1.05	02	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	0 unit	0 unit	10.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	2 unit	10.000.000
5	1	1	1.05	02	Sub kegiiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	78	78	97.500.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	252 Stel	450.000.000
					Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan	JumlahPegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	10 orang	10 orang	100.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	10 orang	50.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							pelatihan											
					Kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah				Program Penunjang Urusan Pemerintahan			443.300.000					345.500.000
5	1	1	1.06	01	Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah)	1 Paket	12.000.000
					Penyediaan Peralatan rumah tangga	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah paket peralatan rumag tangga yang disediaka	Jumlah paket peralatan rumag tangga yang disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Paket	Pkp	3.000.000			Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	1 paket	0

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							n											
5	1	1	1.06	04	Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2 Paket	1 Paket	19.500.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	2 Paket	19.500.000
5	1	1	1.06	05	Sub kegiatan Penyediaan cetak dan penggandaan	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Paket	1 Paket	17.800.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	1 Paket	18.000.000
5	1	1	1.06	06	Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen	18.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	1 dokumen	18.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							yang Disediakan	Disediakan										
5	1	1	1.06	07	Sub kegiatan Penyediaan bahan/material	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4 paket	4 paket	81.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	4 paket	81.000.000
5	1	1	1.06	08	Sub kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	10 Laoran	10 Laoran	14.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	10 Laoran	14.000.000
5	1	1	1.06	09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	36 Laoran	36 Laoran	275.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	36 Laoran	180.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	1	1	1.07		Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah		Jumlah barang milik daerah yang diadahkan	Jumlah barang milik daerah yang diadahkan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	29 jenis	29 jenis	1.205.569.520	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	21 jenis	60.000.000
5	1	1	1.07	06	Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	15 unit	15 unit	150.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	10 unit	60.000.000
5	1	1	1.07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4 unit	4 unit	375.569.520	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	2 unit	230.000.000
5	1	1	1.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	10 unit	10 unit	680.000.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	10 unit	50.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Bangunan Lainnya yang Disediakan	Disediakan										
5	1	1	1.08		Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah jasa penunjang urusan pemda yang disediakan	Jumlah jasa penunjang urusan pemda yang disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	7 jenis	7 jenis	646.200.000	APBD		Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	7 jenis	586.300.000
5	1	1	1.08	01	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	3.800.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	12 Laporan	3.900.000
5	1	1	1.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediaka	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	10.000.0000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	1 Laporan	10.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							n											
5	1	1	1.08	02	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	36 Laoran	36 Laoran	180.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	36 Laoran	130.000.000
5	1	1	1.08	03	Sub kegiatan Penyediaan jasa umum kantor	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	9 orang	9 orang	452.400.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	9 orang	452.400.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	1	1	1.09		Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	70 unit	70 unit	627.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	70 unit	585.000.000
5	1	1	1.09	02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	0 unit	0 unit	2.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	1 unit	2.000.000
5	1	1	1.09	02	Sub kegiatan penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	18 unit	18 unit	500.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	18 unit	500.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	1	1	1.09	06	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	38 unit	38 unit	40.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	40 unit	40.000.000
5	1	1	1.09	10	Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Nilai sakip PD (Satpol PP)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disedia	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disedia	Pkp	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 unit	1 unit	85.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	1 unit	25.000.000
5	2				PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	8.966.500.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	100%	9.332.200.000
						Persentase penurunan gangguan trantibum	Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26%	26%	120.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	31,00%	175.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase penurunan gangguan trantibum	Persentase personil Satpol PP yang berkompeten	Persentase personil Satpol PP yang berkompeten	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	78,40%	78,40%	170.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	81,10%	125.000.000
						Persentase penurunan gangguan trantibum	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Pkp	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35,71%	35,71%	50.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	39,30%	230.000.000
													9.670.000.000					10.090.000.000
5	2	02	1'01		Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui patroli, pengamanan, penertiban dan pengawalan berjalan lancar	Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui patroli, pengamanan, penertiban dan pengawalan berjalan lancar	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	576	576	7.551.500.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum)	604	8.390.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penyelenggaraan pembinaan, deteksi dini dan cegah dini yang digunakan dalam pencegahan gangguan tibumtranmas	Jumlah penyelenggaraan pembinaan, deteksi dini dan cegah dini yang digunakan dalam pencegahan gangguan tibumtranmas	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	12	685.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	12	1.090.000.000
						Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah anggota satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah anggota satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50	50	120.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	50	175.000.000
						Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah SDM Satpol PP yang berkompeten	Jumlah SDM Satpol PP yang berkompeten	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	58	58	170.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	60	175.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	2	0 2	1'01	01	Sub kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	564 Kasus	564 Kasus	7.551.500.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	588 Kasus	8.370.000.000
5	2	0 2	1'01	02	Sub kegiatan Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28 kasus	28 kasus	70.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	28 kasus	75.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan										
5	2	02	1'01	03	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	1 Dokumen	65.000.000
5	2	02	1'01	04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan	Prov. Kep. Babel		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	1 Dokumen	120.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum										
5	2	02	1'01	05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia (HAM)	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Pkp		200 orang	200 orang	225.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	200 orang	180.000.000
5	2	02	1.01	087	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah sapras tibum	Jumlah sapras tibum	Pkp		17 unit	17 unit	700.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	17 unit	442.500.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	2	02	1.01	09	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah masyarakat yang terdampak penegakkan perda dan perkada yang dilayani	Jumlah masyarakat yang terdampak penegakkan perda dan perkada yang dilayani	Pkp		1 laporan	1 laporan	30.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	1 laporan	30.000.000
5	2	02	1.01	08	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah satu dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dibuat dan dimutakhirkan	Jumlah satu dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dibuat dan dimutakhirkan	Pkp		3 dokumen	3 dokumen	50.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	21 dokumen	30.000.000
5	2	02	1'02		Kegiatan Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah aktivitas penegakan perda dan perkada	Jumlah aktivitas penegakan perda dan perkada	Prov. Kep. Babel		1 laporan	1 laporan	290.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	1 laporan	240.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	2	02	1'02	01	Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah sosialisasi perda dan pergUb terhadap masyarakat, aparatur dan badan usaha	Jumlah sosialisasi perda dan pergub terhadap masyarakat, aparatur dan badan usaha	Prov. Kep. Babel		1 laporan	1 laporan	140.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	1 laporan	55.000.000
5	2	02	1'02	02	Sub kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan perda dan pergub	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan perda dan pergub	Prov. Kep. Babel		1 laporan	1 laporan	150.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	1 laporan	130.000.000
5	2	02	1'03		Sub kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah PPNS yang mampu melakukan pemberkasan penyidika	Jumlah PPNS yang mampu melakukan pemberkasan penyidikan	Pkp		1 laporan/25 orang	1 laporan /25 orang	360.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	1 laporan/25 orang	60.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							n											
5	2	02	1'03	01	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Pkp		1 laporan	1 laporan	185.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	1 laporan	65.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	2	0 2	1'03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	Pkp		2 dokumen	2 dokumen	175.000.000	APBD		Persentase penurunan gangguan trantibum	2 dokumen	60.000.000
5	4				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran/ pertolongan	Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	Prov. Kep. Babel	64	64	64	1.569.450.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	67	1.293.700.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	2	02	1'04		Kegiatan Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Jumlah dokumen peta daerah rawan bencana kebakaran	Jumlah dokumen peta daerah rawan bencana kebakaran	Prov. Kep. Babel	64	1 dokumen	1 dokumen	1.484.450.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	1 dokumen	1.243.700.000
5	2	02	1'04	01	Sub Kegiatan Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/ Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Prov. Kep. Babel	64	1 dokumen	1 dokumen	00	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	1 dokumen	0
5	2	02	1'04	03	Sub Kegiatan Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kab/kota	Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Jml laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Prov dan Kab/Kota	jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Prov. Kep. Babel	64	1 laporan	1 laporan	960.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	1 laporan	960.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	2	02	1'04	04	Sub Kegiatan Penyelenggaaan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakarang	Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah kabupaten /kota dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/ kota dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan	Pkp	64	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	1 dokumen	70.000.000
5	2	02	1'04	05	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar	Pkp		18 unit	18 unit	134.450.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	18 unit	3.500.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							standar teknis terkait	teknis terkait										
5	2	02	1'04	06	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	jumlah dokumen periodik penyekenggaraan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri secara berkala, sah dan legal	jumlah dokumen periodik penyekenggaraan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri secara berkala, sah dan legal	Pkp		0 Dokumen	0 Dokumen	90.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	1 dokumen	0
5	2	02	1'04	06	Sub Kegiatan Bimtek terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi	Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Jumlah aparatur kebakaran yang mengikuti bimbingan teknis pencegaha	Jumlah aparatur kebakaran yang mengikuti bimbingan teknis pencegahan,	Pkp		60 orang	60 orang	200.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	60 orang	160.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					dan Kab/Kota		n, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota										
5	2	02	2'04		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulanagan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran	Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulanagan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran	7			7 laporan	7 laporan	85.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	1 laporan	50.000.000

Kode`					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	2	0 2	2'04	01	Sub Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase respontime 15 menit kejadian kebakaran /pertolongan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prov. Kep. Babel		1 laporan	1 laporan	85.000.000	APBD		Nilai sakip PD (Satpol PP)	1 laporan	50.000.000
													26.430.519.520					25.117.450.000

BAB V
PENUTUP

Dengan adanya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) 2022 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dapat dicapai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, tentunya dengan melaksanakan arah kebijakan dan strategi yang dipedomani dalam dokumen Perubahan Renstra 2023-2026 Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja 2024 Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan diverifikasi Bappeda ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD 2024. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program kegiatan dimaksud dapat direalisasikan secara optimal.

Besar harapannya dokumen Rancangan Akhir Renja 2024 ini tidak hanya menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, namun juga menjadi hal yang penting dan memudahkan kita dalam mengevaluasi dokumen perencanaan kedepan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Satpol PP akan mengevaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tidak hanya pada tataran laporan evaluasi, diharpakan juga

dokumen renja ini menjadi suatu hal yang membantu kita dalam menyiapkan dokumen laporan lain seperti LAKIP, LKPJ, SPM, Reformasi Birokrasi dan LPPD perangkat daerah.

Pangkalpinang, Maret 2023

KEPALA POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

YAMOWA'A HAREFA, AP. NIP.
19750130 199402 1 003